



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN SOSIAL  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUPOMO**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **409204**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 4.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/80 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 861.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. MOTOR, VESPA SPRINT IGET 150 ABS AT / SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ----

**D. SURAT BERTHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 83.147.198

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 5.694.147.198



III. HUTANG

Rp. 194.290.950

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.499.856.248

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.